

BAB I

PENDAHULUAN

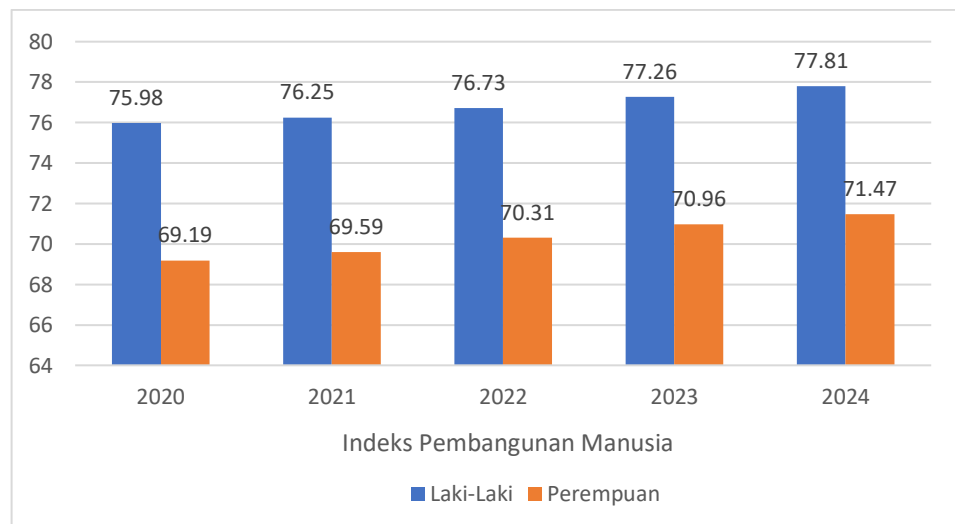
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan ekonomi. Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, pendekatan pembangunan ini juga menekankan investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Melalui upaya ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini diperkuat oleh teori Sen pada tahun 2019, yang membahas pentingnya pembangunan manusia dalam konteks pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia yang efektif akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Ini berarti memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik (Gai et al., 2024).

Menurut Sen dalam (Simanjuntak et al., 2024) pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia, meliputi kebebasan sosial, ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Keberhasilan pencapaian pembangunan manusia tersebut perlu diukur dengan suatu indikator yang dapat dijadikan acuan dalam pengukurannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan manusia dalam suatu wilayah. Selain itu secara gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia bukan hanya tentang kualitas

penduduk. Indeks Pembangunan Manusia juga sebagai acuan utama dalam perencanaan utama pembangunan berkelanjutan di berbagai negara termasuk Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menunjukkan tingginya capaian gender laki-laki dibanding gender perempuan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia yang berarti laki-laki lebih menikmati akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Fenomena rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia perempuan seringkali disebabkan karena faktor budaya dimana perempuan selalu berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga sehingga menjadi hambatan dalam mengakses kesehatan pendidikan dan juga partisipasi dalam dunia kerja. Fenomena Tersebut sangat berkaitan dengan kuatnya budaya yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas

urusan rumah, mulai dari memasak, membersihkan, hingga mengurus keluarga. Anggapan ini sudah ada sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya tersebut membentuk cara pandang masyarakat bahwa peran perempuan di rumah adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dianggap sebagai “kewajiban”. Akibatnya, banyak perempuan yang akhirnya menerima peran tersebut tanpa banyak mempertanyakan, karena sejak kecil mereka sudah terbiasa melihat dan diajarkan hal yang sama.

Selain itu, ada juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Misalnya, perempuan sering dinilai dari kemampuannya mengurus rumah tangga atau menjadi istri dan ibu yang baik. Jika tidak sesuai dengan harapan tersebut, mereka bisa mendapat komentar atau penilaian negatif dari masyarakat. Tekanan seperti itu membuat perempuan cenderung mengikuti norma yang ada, meskipun sebenarnya mereka memiliki pilihan lain. Dalam hal ini, budaya berperan besar dalam membentuk keputusan perempuan. Apa yang terlihat sebagai pilihan pribadi sebenarnya dipengaruhi oleh nilai dan norma yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat. Dengan kata lain, keputusan perempuan untuk kembali ke dapur bukan hanya karena keinginan sendiri, tetapi juga karena pengaruh budaya yang terus membentuk cara berpikir dan bertindak sehingga menjadi hambatan bagi gender perempuan untuk berkembang.

Persoalan gender secara eksplisit tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yaitu: “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Untuk mencapai SDGs tersebut, maka salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penerapan pengarusutamaan gender

(PUG) dalam pembangunan nasional (KPPPA, 2025). Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 1 Berbunyi “Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”

Keberhasilan pembangunan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, namun selain itu juga mencakup pada kualitas sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia merupakan agen dalam pembangunan, sehingga pentingnya dilakukan pembangunan manusia yang diarahkan untuk mengedepankan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Kaitan antara gender dan pembangunan telah menjadi topik yang semakin diperdebatkan di lingkungan politik dan ekonomi. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai secara global adalah kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama terlibat dalam pembangunan (Aini, 2021).

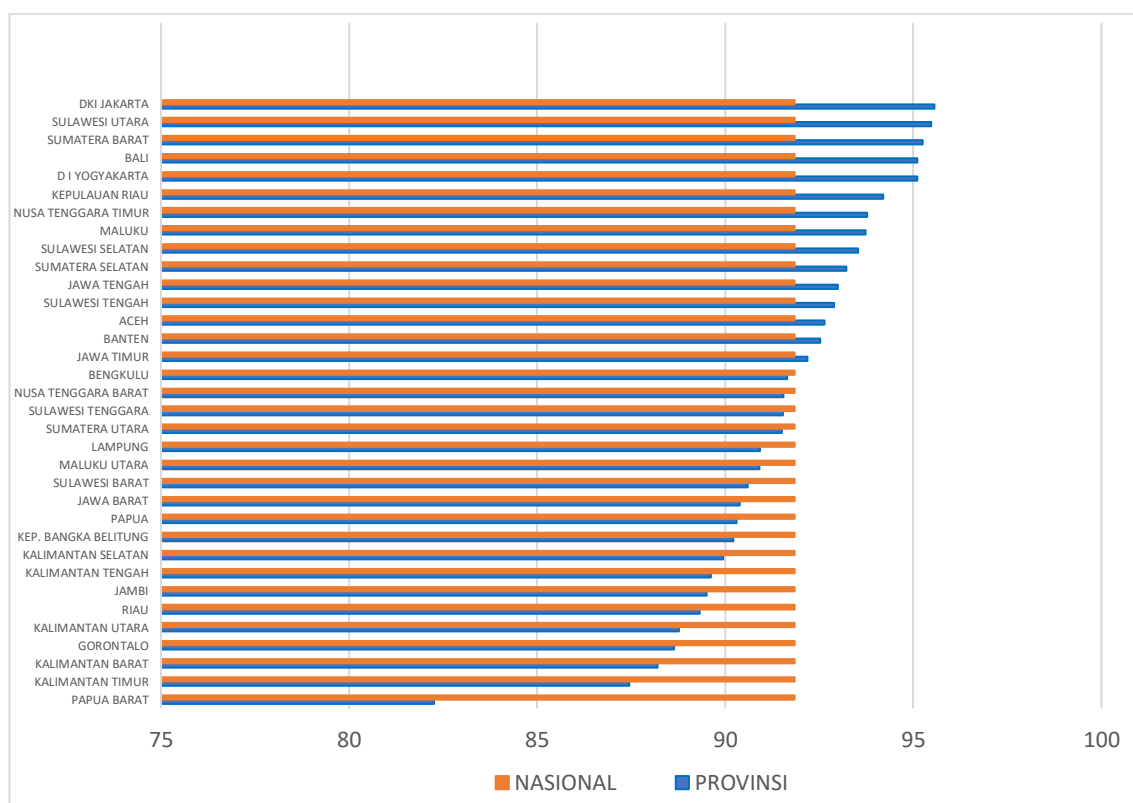
Dalam pembangunan ekonomi, SDM merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan sebuah negara, Hasid dalam (Sriharini et al., 2023). Namun, ketimpangan gender yang masih meluas sering kali menghambat optimalisasi potensi SDM perempuan. Ketidaksetaraan ini terlihat dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan,

keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan, serta representasi yang rendah dalam posisi kepemimpinan. Hambatan ini tidak hanya membatasi perkembangan individu tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian dari Wardana & Magriasti dalam (Sriharini et al., 2023) menunjukkan bahwa negara yang berhasil menerapkan kesetaraan gender cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memberikan diversifikasi dan inovasi di berbagai sektor.

Menurut World Economic Forum (2024) dalam artikel *global gender gap report* menunjukkan data negara Indonesia berada di urutan 100 dari 146 negara dengan angka 0.686, mengalami kemunduran dari urutan 87 pada tahun 2023 dalam hal kesetaraan gender. Dalam laporan tersebut suatu negara bisa dikatakan baik dalam hal kesetaraan gender jika skornya mendekati angka 1. Menurut Rahim dalam (Sriharini et al., 2024) kesetaraan gender telah diakui sebagai elemen fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, kesetaraan gender telah menjadi komitmen bersama yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada poin ke-5 yang menekankan pentingnya menghapus ketimpangan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan. Salah satu alat ukur utama dalam menilai kemajuan kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ini dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk merefleksikan sejauh mana pencapaian perempuan dibandingkan dengan laki-laki

dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan (diukur melalui umur harapan hidup), pendidikan (melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan). Dengan demikian, IPG tidak hanya mengukur akses terhadap layanan dasar, tetapi juga merepresentasikan kualitas hidup yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah (Lestari et al., 2025).



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Berdasarkan 34 Provinsi Tahun 2024 (Persem)

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2024 masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah. Tercatat sebanyak 19 provinsi memiliki nilai IPG di bawah rata-rata nasional sebesar 91,85. Papua Barat menjadi provinsi dengan capaian terendah, yaitu 82,26, sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, yaitu 96,5.

memiliki nilai tertinggi dengan angka 95,56. Secara nasional, nilai IPG yang baik yaitu mendekati angka 100 karena angka tersebut merupakan titik kesetaraan. Berdasarkan Gambar 1.2, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan gender di Indonesia belum berlangsung secara merata di seluruh provinsi pada tahun 2024. Beberapa provinsi yang memiliki IPG yang tinggi, sementara daerah lain masih tertinggal karena hambatan struktural dalam akses perempuan terhadap sumber daya dan partisipasi dalam pembangunan (Tambunan & Santoso, 2025).

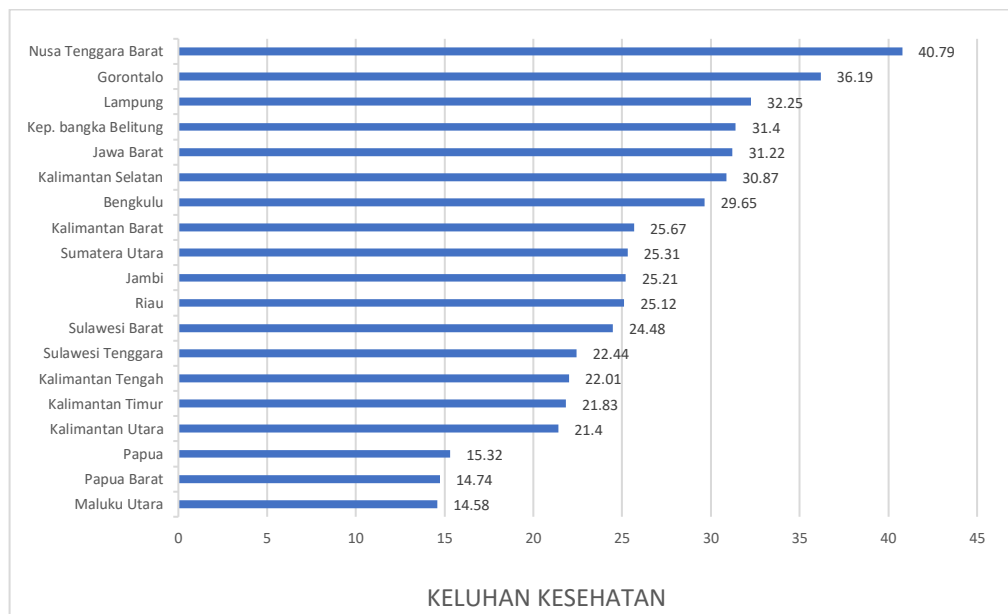
Menurut Muhlasul (2017) dalam teori Pembangunan Manusia Sen yang dianut oleh UNDP sebagai tolak ukur pembangunan sebuah negara, disebutkan dua masalah pokok yang harus menjadi komponen penyelesaian (evaluatif) dari pembangunan, yaitu *diversity* (keberagaman) dan keadilan (*equality/justice*). Kedua masalah ini bisa diselesaikan dengan apa yang disebut sebagai *functioning*, yaitu pemberian kebebasan substantif yang berfungsi sebagai *the primary ends* (tujuan) sekaligus *the principal means* (cara) yang berupa kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan, dan jaminan keamanan. Kebebasan substantif yang dimaksud adalah bahwa pembangunan harus membuka pintu-pintu belenggu perbedaan dengan cara memberi ruang akses yang sama sesuai dengan kadar perbedaan yang dimaksud. Dengan demikian, maka kondisi yang *fair* dan manusiawi akan tercipta dalam kompetisi pasar yang sehat. *Functioning* yang dimaksud merupakan unsur-unsur yang akan mengangkat kapabilitas manusia menuju *well-being* (kemakmuran) dan penguasaan terhadap *primary goods* (materi dan sosial) secara layak.

Tiga hal di atas (masalah, *functioning* dan kapabilitas) merupakan konsepsi nilai-nilai etik paling fundamental yang dianggap sebagai *focal variabel/basal right* (variabel utama dan universal) yang mendasari cara dan tujuan pembangunan. Merujuk pada tiga konsep di atas, UNDP merumuskan beberapa indikator sebagai vocal variabel turunan yang dianggap mewakili keseluruhan indikator terpenting dalam hidup manusia, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (atau standar hidup layak). Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa tiga konsep Amartya Sen tersebut harus diterapkan dalam ketiga indikator pembangun Pembangunan Manusia.

Berdasarkan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 “Sehat adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan individu maupun masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor lingkungan, faktor genetik, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Aspek perilaku seperti pola hidup yang kurang sehat, tingkat stres yang tinggi, serta pola makan yang tidak teratur dapat menimbulkan keluhan kesehatan. Selain itu, kondisi lingkungan fisik meliputi kualitas air, udara, dan tanah di sekitar tempat tinggal, lingkungan pergaulan, serta ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga turut mempengaruhi munculnya keluhan kesehatan (BPS, 2019).

Kebijakan kesehatan tidak hanya ditujukan untuk pengobatan penyakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib

menyediakan layanan kesehatan secara inklusif dan non diskriminatif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun geografis, yang membatasi pemanfaatan layanan kesehatan secara optimal (Ihsan et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Indrasetyaningsih et al. (2021) menunjukkan bahwa keluhan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Lestari et al. (2019) menemukan bahwa keluhan kesehatan negatif tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

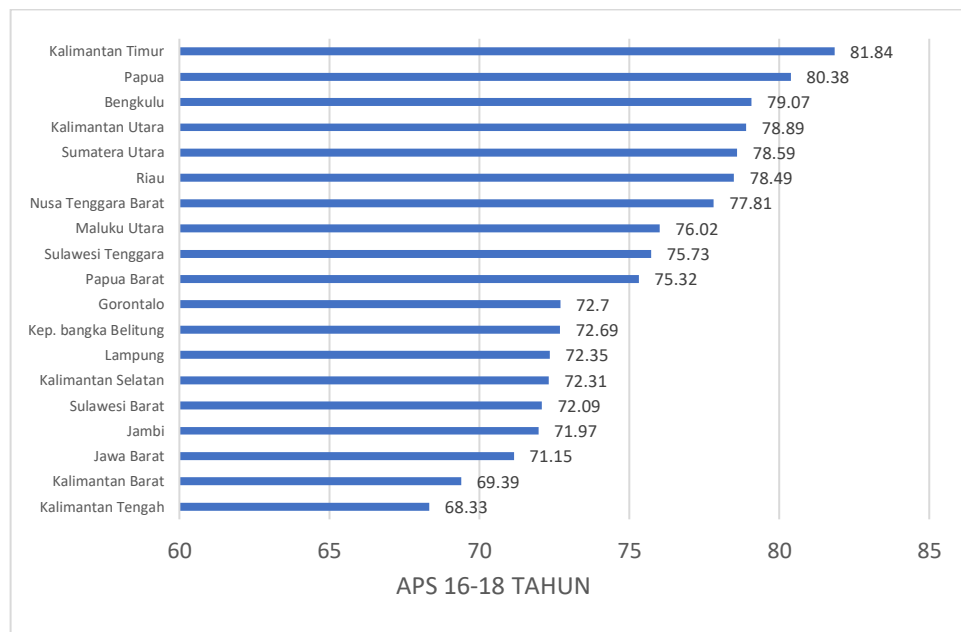
Gambar 1.3 Persentase Keluhan Perempuan Terhadap Kesehatan Berdasarkan 19 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (Persen)

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase keluhan kesehatan tertinggi, yaitu sebesar 40,79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, masih relatif rendah, karena hampir separuh populasi perempuan di provinsi tersebut melaporkan mengalami keluhan

kesehatan. Sebaliknya, Provinsi Maluku Utara berada pada tingkat keluhan kesehatan yang lebih rendah, yakni sebesar 14,58%. Berdasarkan Gambar 1.3, perbedaan ini menggambarkan adanya kesenjangan kondisi kesehatan antarprovinsi, yang salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat. Kebijakan pemerintah terutama dalam pemerataan pembangunan dan juga pada fokus kesehatan masih kurang mencakup ke seluruh elemen masyarakat seperti program “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” (Annastasya, 2024).

Partisipasi dalam pendidikan juga berperan penting dalam mencapai suatu kesetaraan gender. Pendidikan yang baik, menggambarkan sumber daya manusia yang baik pula. Investasi dalam bidang pendidikan sangat berguna dan berpengaruh bagi modal manusia karena nantinya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Persentase perempuan yang masih sekolah di umur 16-18 tahun atau jenjang SMA selalu berada di atas laki-laki dalam 5 tahun terakhir secara nasional. Hal tersebut menandakan bahwa perempuan unggul dalam pendidikan tingkatan SMA (BPS, 2025).

Pendidikan perempuan memiliki peran yang sangat penting sebagai pendorong perubahan sosial serta pencapaian kesetaraan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Lukiswati et al. (2020) menemukan hasil bahwa angka partisipasi sekolah umur 16-18 tahun berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan gender di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Aprilianti & Setiadi (2022) menemukan hasil bahwa angka partisipasi sekolah umur 16-18 tahun tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.4 Angka Partisipasi Sekolah Umur 16-18 Tahun Berdasarkan 19 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (Persen)

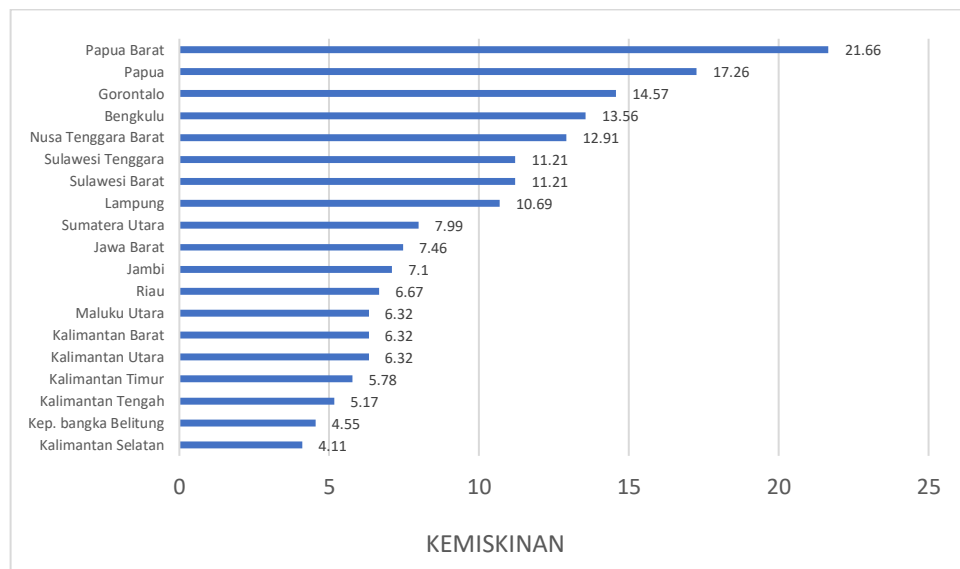
Provinsi Kalimantan Timur memiliki angka persentase tertinggi dibandingkan 18 provinsi lainnya pada tahun 2024, dengan capaian sebesar 81,84%. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai angka 68,33% dan menempati posisi terendah. Perbedaan capaian tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan antarprovinsi. Berdasarkan Gambar 1.4, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan belum sepenuhnya terwujud, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Ketidakmerataan akses pendidikan berbasis gender tidak hanya berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Akses yang setara terhadap pendidikan bagi perempuan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu perempuan itu sendiri, tetapi juga membawa

dampak positif yang luas bagi keluarga, komunitas, dan pembangunan sosial-ekonomi bangsa (Ananda et al., 2025).

Kemiskinan juga memiliki peran dalam mencapai suatu kesetaraan dalam konteks kelayakan hidup, dimana perempuan selalu merasakan dampak yang lebih besar dari laki-laki dalam suatu rumah tangga. Terjadinya kemiskinan salah satu diantaranya adalah karena adanya kondisi dimana perempuan kehilangan kesempatan untuk memberdayakan diri yang akhirnya menyebabkan kebanyakan perempuan memiliki ketergantungan pada laki-laki, seperti adanya ketergantungan secara materi oleh istri kepada suami (Alfrojems et al., 2022).

Peran ganda juga menjadi tantangan besar bagi perempuan, di satu sisi sebagai pencari nafkah di sisi lain sebagai ibu rumah tangga. Suami secara umum di dalam masyarakat merupakan tulang punggung keluarga. Dalam hal ekonomi suami menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ketika suami tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dalam kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan, maka istri akan memiliki peran ganda untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga miskin tersebut. Selain menjadi ibu rumah tangga, di sinilah istri memiliki peran untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara ekonomi (Laksono, 2017). Penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan oleh Aprilianti & Setiadi (2022) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender di kawasan Teluk Tomini. Sedangkan, Zalukhu & Collyn (2021) menemukan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

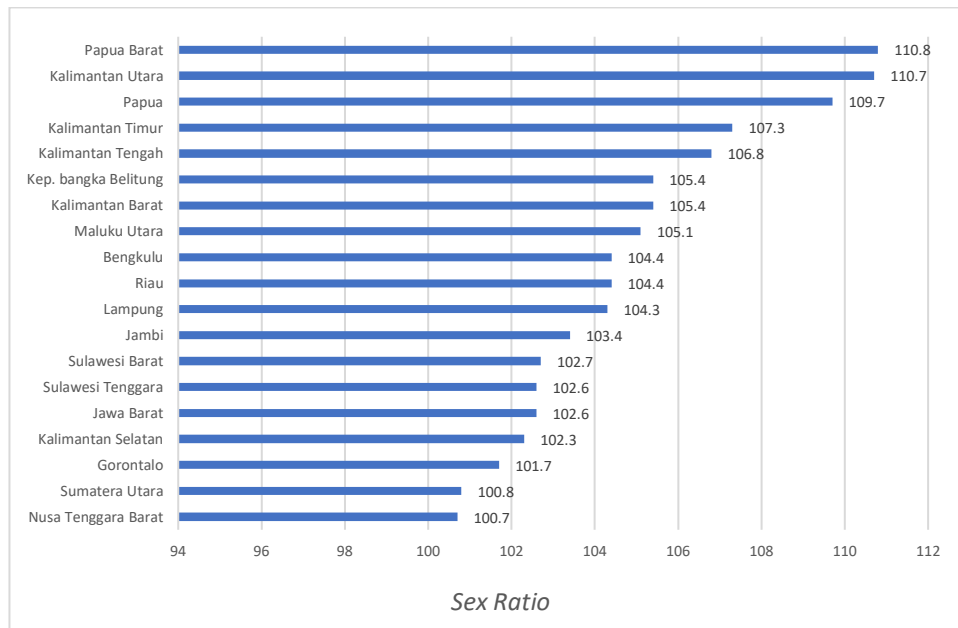
Gambar 1.5 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan 19 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (Persen)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat memiliki angka yang relatif tinggi, yaitu sebesar 21,66%. Kondisi kemiskinan yang tinggi tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan, mengingat kedua aspek tersebut merupakan bagian dari standar kelayakan hidup manusia. Papua Barat yang juga memiliki capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah menunjukkan kuatnya keterkaitan antara tingginya tingkat kemiskinan dengan rendahnya kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan Gambar 1.5, kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan kesetaraan gender. Penurunan tingkat kemiskinan diyakini akan berkontribusi pada peningkatan IPG, karena individu dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk terus berkembang.

Selain itu, stabilitas ekonomi mendorong pemahaman dan penghargaan yang lebih baik terhadap perbedaan gender, sehingga gender tidak lagi dipandang sebagai

penghalang dalam cara berpikir. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki sering kali dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, terutama setelah memasuki kehidupan berumah tangga. Ketergantungan tersebut tidak jarang meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang pada dasarnya berawal dari keterbatasan pendapatan dan tekanan ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan pendapatan yang rendah sangat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Keterbatasan pendapatan ini juga dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi standar hidup sehari-hari, termasuk akses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai (Pamungkas & Hukom, 2024).

Ketidakmerataan gender dalam segi populasi seringkali menjadi tantangan bagi perempuan. *Sex Ratio* atau rasio jenis kelamin merupakan gambaran mengenai perbandingan populasi laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki di umur 0-49 tahun lebih unggul dibanding perempuan. Namun di umur 50 ke atas perempuan lebih unggul dibanding laki-laki (BPS, 2024). Hal tersebut menandakan kualitas bertahan hidup perempuan lebih baik dari pada laki-laki meskipun angka kelahiran laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Angka 100 merupakan angka setara dalam perbandingan populasi suatu gender. Penelitian mengenai *Sex Ratio*, Alfarizi & Hasyimi (2024) menemukan bahwa *sex ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan gender di 34 provinsi. Sedangkan Utami & Arif (2023) menemukan hasil tidak signifikan di DI Yogyakarta.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.6 Sex Ratio/Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan 19 Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (Persen)

Seluruh provinsi menunjukkan capaian *sex ratio* di atas angka 100, yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan pada 19 provinsi pada tahun 2024. Kondisi ini pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Namun, secara teoritis, besarnya jumlah penduduk dapat menjadi modal penting bagi kemajuan suatu negara apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan gender juga memiliki implikasi terhadap upaya pencapaian kesetaraan gender. Semakin besar proporsi perempuan dalam struktur penduduk, semakin terbuka peluang untuk mendorong partisipasi dan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan Gambar 1.6, Provinsi Papua Barat memiliki angka *sex ratio* tertinggi, yang menandakan adanya kesenjangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang paling lebar. Kondisi tersebut sejalan dengan posisi Papua Barat yang berada

pada urutan terendah di antara 19 provinsi dengan capaian IPG di bawah rata-rata nasional, sehingga mengindikasikan bahwa ketimpangan komposisi penduduk berdasarkan gender berpotensi mempengaruhi rendahnya kualitas pembangunan gender di wilayah tersebut.

Kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap orang dari berbagai golongan baik golongan kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan gender dalam setiap bidang kehidupan di hidupnya (Trisnawati & Widiandiyah, 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, meskipun kajian mengenai kesetaraan gender telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan indikator langsung seperti rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu keluhan kesehatan, pendidikan (APS usia 16–18 tahun), kemiskinan, dan *sex ratio*. Variabel demografi, khususnya *sex ratio*, jarang digunakan dalam penelitian IPG. Padahal, data BPS menunjukkan adanya disparitas IPG yang cukup tajam antarprovinsi dalam kondisi dimana jumlah penduduk gender laki-laki lebih unggul. Kondisi ini menjadi celah penelitian dan *novelty* dari studi ini, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Indeks Pembangunan Gender Pada Provinsi IPG Rendah Di Indonesia Tahun 2020-2024”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Keluhan Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan, dan *Sex Ratio* secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Gender pada 19 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Keluhan Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan, dan *Sex Ratio* secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Gender pada 19 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Keluhan Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan, dan *Sex Ratio* secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Gender pada 19 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Keluhan Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan, dan *Sex Ratio* secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Gender pada 19 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan studi gender. Penelitian ini mengintegrasikan struktur demografis dalam satu kerangka analisis yaitu *sex ratio* untuk memahami dinamika pembangunan gender secara lebih utuh. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG), terutama pada wilayah dengan tingkat IPG rendah yang memiliki karakteristik pembangunan yang beragam karena adanya disparitas IPG yang cukup tajam antarprovinsi dalam kondisi dimana jumlah penduduk gender laki-laki lebih unggul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dengan memberikan perspektif alternatif dalam mengkaji IPG, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada ketimpangan pembangunan berbasis gender di tingkat regional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya di 19 provinsi di Indonesia, dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender. Temuan

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan responsif gender, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Gender secara berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep pembangunan gender serta faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti selanjutnya untuk mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan dan metode analisis kuantitatif dalam kajian empiris. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengalaman akademik yang berharga serta menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang ekonomi pembangunan dan studi gender.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil penulis pada penelitian ini adalah 19 provinsi di wilayah Indonesia yang terdiri dari Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Papua, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan

